

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN PAKET WISATA  
DI BIRO PERJALANAN WISATA CV. MALINDA TOUR SOLO**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Disusun Oleh:

FANDY RASYID

C 100120072

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN PAKET WISATA  
DI BIRO PERJALANAN WISATA CV. MALINDA TOUR SOLO**

**PUBLIKASI ILMIAH**

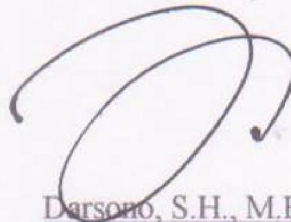
**Oleh:**

FANDY RASYID

C 100120072

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



Darsono, S.H., M.H.

NIK. 324

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN PAKET WISATA  
DI BIRO PERJALANAN WISATA CV. MALINDA TOUR SOLO**

**Oleh:**

FANDY RASYID

C 100120072

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Darsono, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()



Dekan,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati SH., M.Hum.

NIK. 537

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

**Surakarta, 17 Juli 2017**

Penulis



**FANDY RASYID**

C 100120072

## **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN PAKET WISATA DI BIRO PERJALANAN WISATA CV. MALINDA TOUR SOLO**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa (1) pelaksanaan yang diberikan oleh Biro Perjalanan Wisata terhadap konsumen berupa hak dan kewajiban antar pihak, (2) bentuk perjanjian yang digunakan dalam pengadaan paket wisata di Biro Perjalanan Wisata CV. Malinda Tour, (3) upaya penyelesaian akibat pembatalan atau salah satu pihak terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengadaan paket wisata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan analisis dan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu Kewajiban pokok Biro Perjalanan Wisata CV. Malinda Tour Solo sebagai penerima pekerjaan adalah melakukan seperangkat pelayanan jasa-jasa pengangkutan, akomodasi, makan/minum dan menikmati obyek/atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata, (2) Bentuk perjanjian paket wisata yang dibuat oleh CV. Malinda Tour dibuat dalam bentuk tertulis yaitu Biro Perjalanan Wisata telah menyiapkan suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak kemudian pihak klien tinggal mengisi dan menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian paket wisata yang dibuat ini tidak bersifat *standard contract* murni, (3) Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perubahan perjanjian paket wisata di CV. Malinda Tour selalu diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika jalan musyawarah tidak berhasil maka penyelesaiannya dilakukan secara hukum di Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.

Kata Kunci: perjanjian, paket wisata, biro perjalanan wisata

### **Abstract**

*This study aims to examine and analyze (1) the implementation provided by the Travel Bureau to consumers in the form of rights and obligations between parties, (2) Form of agreement used in the procurement of tour packages at the Travel Bureau of CV. Malinda Tour, (3) Settlement efforts due to cancellation or one of the parties is a default in the procurement agreement of the tour package. This study is a normative research. Methods of data collection through literature study and interview. Technical analysis of data using analysis and deductive methods. The results showed that: (1) Implementation of rights and obligations between the two parties namely the principal obligations of the Travel Bureau of CV. Malinda Tour Solo as the recipient of the job are to perform a set of services of transportation, accommodation, eating / drinking and enjoying tourist objects / attractions in order to organize the tour, (2) Form of package tour agreement made by CV. Malinda Tour is made in written form that the Travel Bureau has prepared a form of agreement that has been printed then the client just to fill and sign the agreement. This tour package agreement is not a pure standard contract, (3) Efforts made in finalizing the change of package tour agreement at CV.*

*Malinda Tour is always strived by way of deliberation to consensus, if the way deliberation is not successful then the settlement is done legally in the local District Court authorized.*

*Keywords: agreements, tour packages, travel agencies*

## **1. PENDAHULUAN**

Banyak bentuk-bentuk kegiatan perjalanan yang dilakukan orang, apabila kegiatan perjalanan mempunyai ciri-ciri bersifat santai, gembira, dan untuk bersenang-senang, perjalanan yang demikian disebut "perjalanan wisata," atau yang kini populer lazim disebut "pariwisata" atau "*Tour*" (dalam istilah kata bahasa Inggris). Orang yang melakukan perjalanan wisata disebut "wisatawan".

Pengelolaan perjalanan wisata yang dibuat antara badan usaha jasa pariwisata dengan pengguna jasanya, pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu untuk membuat perjanjian atau kontrak diperlakukan ketelitian dan kecermatan para pihak, baik dari pihak badan usaha jasa pariwisata maupun dari pihak pengguna jasanya.<sup>1</sup> Oleh karena itu Biro Perjalanan Wisata yang hendak memberikan penawaran paket wisata ini juga perlu memperhatikan hak-hak yang harus dipenuhi oleh konsumennya tersebut.

Namun dalam kenyataannya banyak konsumen yang dirugikan oleh tindakan Biro Perjalanan Wisata dan jarang sekali konsumen menempuh jalur hukum untuk mempertahankan haknya. Konsumen lebih banyak mengalah dan membiarkan ketika terjadi perbuatan sepihak dari Biro Perjalanan Wisata karena adanya klausul eksonerasi (membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab) dalam perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan konsumen menganggap itu merupakan bagian dari perjanjian yang harus di patuhi dan seringkali tidak disadari oleh konsumen ketika menandatangani perjanjian tersebut walaupun disadari tetapi karena konsumen membutuhkan paket wisata tersebut, maka mau tidak mau konsumen tersebut harus menyetujui syarat-syarat yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh Biro Perjalanan Wisata secara sepihak atau

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *et.al.*, 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 1.

bersama. Disamping itu sering terjadi pula adanya 2 perjanjian yang berbeda antara Biro Perjalanan Wisata dengan pihak panitia dan pimpinan institusi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis ingin mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Perjanjian Pengadaan Paket Wisata Biro Perjalanan Wisata CV. Malinda Tour Solo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa: (1) pelaksanaan yang diberikan oleh Biro Perjalanan Wisata terhadap konsumen berupa hak dan kewajiban antar pihak, (2) bentuk perjanjian yang digunakan dalam pengadaan paket wisata di Biro Perjalanan Wisata CV. Malinda Tour, (3) upaya penyelesaian akibat pembatalan atau salah satu pihak terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengadaan paket wisata.

## **2. METODE**

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastasaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar Nurdewata, et.al, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 47.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpul data dengan cara Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan Wawancara dengan nara sumber, yaitu Direktur Utama CV. Malinda Tour Solo dan para pengguna jasa.

Setelah diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bentuk atau Model Perjanjian Paket Wisata di Biro Perjalanan Wisata CV. Malinda Tour**

Kerja sama Biro Perjalanan Wisata CV. Malinda Tour, selama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut disusun untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perikatan perjanjian. Penuangan hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk penegasan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian Kerja sama Biro Perjalanan Wisata CV. Malinda Tour, adalah pemilik Biro Perjalanan Wisata CV. Malinda Tour dengan klien yang menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata CV. Malinda Tour.

Perjanjian Paket Wisata di dalamnya berisi unsur-unsur pelayanan jasa tetapi terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga perjanjian yang demikian itu tak dapat dipisah-pisahkan. Dalam ranah Hukum Perjanjian sebagaimana dikemukakan J. Satrio, perjanjian yang demikian dimana di dalamnya mengandung unsur-unsur perjanjian bernama, tetapi terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga perjanjian yang demikian itu tak dapat dipisah-pisahkan



sebagai perjanjian yang berdiri sendiri sendiri, disebut “Perjanjian Campuran.” Ciri dari perjanjian campuran adalah yang mempunyai dua atau atau lebih perjanjian bernama (*onbenoemde* atau *innominaat contracten*).<sup>3</sup>

Beberapa unsur perjanjian bernama yang terdapat dalam perjanjian Paket Wisata adalah perjanjian pengangkutan (transportasi), perjanjian sewa-menyewa kamar hotel (akomodasi), perjanjian jual-beli makanan dan minuman, perjanjian untuk menikmati obyek wisata dan hiburan (*entertainment*) dan perjanjian pelayanan lain-lain. Menurut menurut M.A. Desky, Paket Wisata minimal harus berisidua pelayanan jasa saja,<sup>4</sup> sehingga dalam perjanjian Paket Wisata dapat hanya terdiri dari dua unsur perjanjian yaitu paling tidak perjanjian pengangkutan dan perjanjian pelayanan untuk menikmati obyek wisata.

Membahas tentang bentuk perjanjian hukum dari hubungan yang diadakan oleh CV. Malinda Tour Wisata sebagai biro perjalanan wisata, terlebih dahulu dideskripsikan konstruksi hukum Perjanjian Paket Wisata, sebagai dasar hukum yang dijadikan sebagai hukum *in abstracto* mengenai Perjanjian Paket Wisata yang diselenggarakan oleh CV. Malinda Tour.

Telah disimpulkan bahwa konstruksi hukum Perjanjian Paket Wisata secara umum adalah sebagai berikut:

Perjanjian Paket Wisata adalah perjanjian dimana Biro Perjalanan Wisata mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan pengangkutan, akomodasi, makan/minum dan menikmati obyek dan atau atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata, dan pihak yang lain untuk membayar upah yang telah dijanjikan.

Kerjasama dalam pelayanan perjalanan wisata CV. Malinda Tour, diperkuat dengan adanya ikatan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian pelayanan perjanjian wisata dalam penelitian ini mengambil salah satu contoh perjanjian dengan SMP Negeri 3 Colomadu.

Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan menganut sistem terbuka, artinya dimungkinkan adanya perikatan atau hubungan hukum di luar

---

<sup>3</sup> J. Satrio 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 118.

<sup>4</sup> M.A. Desky, 2001. *Pengantar Bisnis Biro Perjalanan Wisata*. AdiCitia Karya Nusa Yogyakarta, hal. 23.

perikatan atau hubungan hukum yang ada dalam ketentuan Buku III KUH Perdata tersebut, yaitu hubungan hukum yang dilakukan dan dibuat menurut kehendak dan kepentingan pihak-pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, bahwa untuk membuat suatu hubungan hukum diserahkan sepenuhnya kepada para pembuatnya atau pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Penyerahan hubungan hukum secara penuh dalam pembuatan perjanjian merupakan cerminan adanya kepercayaan yang terjadi pada dua belah pihak. Kedua belah pihak menyadari bahwa kepercayaan tetap diperlukan dalam hubungan perjanjian. Kedua belah pihak harus menjaga kepercayaan yang terjadi antar kedua belah pihak.

Perjanjian pada umumnya tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu, oleh karena itu perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis sifatnya sebagai alat pembuktian yang dapat dipakai apabila terjadi perselisihan antara para pihak yang memperjanjikannya. Kebiasaan perjanjian studi tour di CV. Malinda Tour, diadakan perjanjian secara tertulis. Hal ini dimaksudkan agar poin-poin yang menjadi kesepakatan tidak dipermainkan dan dilanggar. Penulisan perjanjian juga dimaksudkan agar poin-poin kesepakatan tidak ditambah atau dikurangi oleh kedua belah pihak semata-mata untuk kepentingan masing-masing.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama bapak Suherjan, BA tanggal 10 Maret 2017 selaku Direktur Utama CV. Malinda Tour bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian paket wisata, maka konsumen atau pengguna jasa dapat dengan telepon, melalui faximile atau datang langsung ke CV. Malinda Tour. Kemudian setelah adanya kesepakatan atas lokasi dan biaya perjalanan maka kedua belah pihak saling berhadapan untuk melakukan penandalangan perjanjian paket wisata.<sup>5</sup>

Gambaran mekanisme kontrak yang ada di CV. Malinda Tour adalah sebagai berikut: Direktur memberikan tugas kepada Manager Operasional untuk membuat kontrak sesuai dengan kebutuhan klien dan selanjutnya klien

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suherjan, selaku Pemilik sekaligus Direktur CV Malinda Tour, pada hari Senin 20 Maret 2017

mempelajari kontrak tersebut. Selebihnya point-point dalam kontrak adalah tetap atau tidak berubah, kecuali klien menginginkan adanya tambahan pasal.<sup>6</sup>

Pasal-pasal yang dapat dirubah adalah pasal 3 tentang Fasilitas, pasal 4 tentang Jadwal Pelaksanaan, pasal 5 tentang Harga, Jumlah Peserta dan Nilai Kontrak, pasal 8 tentang tata cara pembayaran Perjanjian baku sendiri merupakan perjanjian yang isinya tidak dapat diganti, jadi tidak ada kemungkinan untuk mengganti isi perjanjian. Menurut Hondius, perjanjian baku adalah konsep perjanjian yang tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya tidak terbatas yang sifatnya tertentu.<sup>7</sup> Dalam uraian di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan perjanjian paket wisata yang dilakukan tidak bersifat standard contract murni, karena masih dimungkinkannya terjadi perubahan-perubahan isi perjanjian tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan syarat dari perjanjian paket wisata sendiri tidak berbeda dengan syarat-syarat perjanjian pada umumnya yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Setelah klien mempelajari dan jika sudah sepakat dengan isi kontrak dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak. Dengan ditandatanganinya kontrak ini, maka kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian karena dalam perjanjian ini telah diatur secara jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban keputusan dan solusi, sebab Direktur bertanggung jawab atas masalah legal dalam perusahaan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas tentang bentuk perjanjian paket wisata yang dibuat oleh CV. Malinda Tour dengan klien. Penulis mendeskripsikan proses kerja awal terjadinya kesepakatan antara CV. Malinda Tour dengan Sekolah dimulai dengan datangnya salah satu panitia ke kantor CV. Malinda Tour dan mereka meminta dibuatkan penawaran untuk paket ke Pesona Bali Dewata selama 5 hari 4 malam dengan beberapa macam bentuk penawaran. Selanjutnya terjadi negosiasi antara CV. Malinda Tour dengan pihak Sekolah. negosiasi ini dilakukan

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Aji Wibawa, selaku Manajer Operasional Malinda Tour, pada hari Senin 20 Maret 2017

<sup>7</sup> Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Medan, hal 47.

hingga 3 kali pembicaraan kemudian terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka CV. Malinda Tour membuat draft kontrak untuk dipelajari dan disepakati. Setelah disepakati pasal-pasal dalam draft kontrak, maka CV. Malinda Tour dan Sekolah melakukan tanda tangan kontrak dan disertai pembayaran DP (down payment) sebesar 50 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 87.750.000,- yang dibayarkan pada saat penandatanganan kontrak. Pada tanggal 16 November 2015 terjadi penandatanganan kontrak disertai dengan pembayaran DP sebesar 50% dari total nilai kontrak dan sisanya akan dibayarkan 2 hari sebelum pelaksanaan perjalanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nilai kontrak pekerjaan adalah Rp. 175.500.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

### **3.2 Hak dan Kewajiban antara Biro Perjalanan Wisata Malinda Tour dengan Pengguna Jasa**

Di dalam perjanjian paket wisata ini ada dua pihak yang berhadapan dan saling berjanji dengan yang lain, yaitu antara Biro Perjalanan Wisata dengan kliennya. Dalam hal ini masing-masing pihak saling mempunyai hak dan kewajiban yaitu:

#### **3.2.1 Hak CV. Malinda Tour sebagai Biro Perjalanan adalah :**

- a. Menerima sejumlah uang pembayaran dari klien, baik itu masih dalam bentuk DP (*down payment*) hingga pelunasan.
- b. Menerima *cancellation fee* jika terjadi pembatalan dari pihak klien.
- c. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan terjadi perubahan program acara faktor non teknis, maka Pihak Kedua berhak merubah acara dengan kesepakatan pihak pertama.
- d. Bila perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan mengakibatkan fasilitas wisata yang telah tercantum dalam perjanjian paket wisata tidak dapat digunakan maka Pihak Kedua berhak untuk mengganti dengan fasilitas yang setaraf.

#### **3.2.2 Kewajiban CV. Malinda Tour adalah:**

- a. Mengelola paket tour dan melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

- b. Menangani segala masalah yang timbul selama tour berlangsung.
- c. Memberikan pelayanan / *service* kepada klien sesuai dengan fasilitas yang tertuang dalam kontrak.
- d. Adanya perlindungan asuransi untuk menjamin keselamatan perserla selama kegiatan tour berlangsung.
- e. Memberikan copy CD lour dan dokumentasi yang dijanjikan baik dalam foto ukuran 4R sampai foto ukuran 10R dan pigura.

#### 3.2.3 Hak Klien adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan di dalam kontrak
- b. Mendapatkan fasilitas yang sudah disepakati bersama
- c. Ikut merumuskan isi perjanjian paket wisata dengan Biro perjalanan
- d. Berhak mendapatkan jaminan asuransi keccelakaan selama kegiatan wisata berlangsung sampai dengan selesai.

#### 3.2.4 Kewajiban klien adalah sebaigai berikut :

- a. Membayar biaya tour sesuai dengan kesepakatan
- b. Membayar *cancellation fee* (jika terjadi pembatalan) sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Jika perubahan jadwal pelaksanaan dilakukan lebih dari satu kali, maka Pihak Pertama diwajibkan untuk membayar biaya pengganti rcservasi sebesar Rp.300.000 per kali perubahan.

Dalam kasus dengan Sekolah ini, pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak telah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala, namun demikian CV. Malinda Tour berusaha untuk tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Kendala yang terjadi pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Dalam hal ini CV. Malinda Tour bersikap luwes karena tidak langsung mengenakan pasal 10 tentang konsekuensi pembatalan jika dilakukan oleh *klien* melainkan mengutamakan musyawarah untuk mufakat bersama.

Pihak Sekolah sendiri telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar DP sebesar 50% dari jumlah total nilai kontrak. Dalam hal ini Sekolah atau bisa disebut Pihak kedua telah melakukan perubahan sepihak dalam

perjanjian paket wisata, dan pada akhirnya perubahan perjanjian paket wisata ini dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak.

Sehubungan dengan perumusan perjanjian J. Satrio mengatakan bahwa suatu perumusan perjanjian selalu menonjolkan ciri-ciri khas yang terkandung dalam apa yang hendak dirumuskan dan perumusan perjanjian selalu menonjolkan isi prestasi pokok dari salah satu atau kedua belah pihak; seperti pada perjanjian jual-beli, pasti menyebutkan pihak satu berkewajiban membayar sejumlah uang dan kontra prestasi yang lain menyerahkan barang.<sup>8</sup>

Apabila pernyataan tersebut dihubungkan dengan perumusan Perjanjian Paket Wisata khususnya Perjanjian Paket Study Wisata sebagai telah dideskripsikan, maka mengingat bahwa perjanjian tersebut adalah merupakan perjanjian campuran, maka ciri-ciri khas yang terkandung dalam perjanjian Perjanjian Paket Study Wisata ini adalah ditonjolkannya seperangkat prestasi melakukan pekerjaan pada pihak yang satu sedangkan dan satu kontra prestasi yang lain yaitu membayar upah

Isi dari perjanjian paket wisata ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak. jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian ini. Dengan adanya hak dan kewajiban yang jelas yang tertuang dalam perjanjian maka para pihak telah mengetahui secara pasti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. ini bertujuan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan kedua belah pihak.

Dalam pasal 1234 KUH Perdata tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi karena sejak lahirnya kata sepakat antara kedua belah pihak maka perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

---

<sup>8</sup> J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan tanggung Menanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 11.

### **3.3 Penyelesaian Akibat Pembatalan atau Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaaan Paket Wisata**

J. Satrio menjelaskan ada tiga kemungkinan bentuk-bentuk tindakan wanprestasi yaitu jika : debitur sama sekali tidak berprestasi; debitur keliru berprestasi atau debitur terlambat berprestasi.<sup>9</sup> Wanprestasi ini ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan adalah diluar kesalahannya, jadi wanprestasi itu terjadi karena debitur mempunyai kesalahan.<sup>10</sup>

Subekti menyatakan, apabila terjadi wanprestasi, maka kreditur mempunyai beberapa pilihan atas berbagai macam kemungkinan tuntutan. Kemungkinan pilihan tersebut adalah berupa tuntutan pemenuhan perjanjian meliputi : pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; ganti rugi saja; pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.<sup>11</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan tanggungjawab dalam wanprestasi adalah tentang apa yang dapat dituntut terhadap seorang debitur yang telah berada dalam keadaan wanprestasi. Berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan beberapa kemungkinan pilihan tuntutan sebagaimana disebut, maka dapat dinyatakan bahwa tanggungjawab seorang debitur bila telah berada dalam keadaan wanprestasi adalah: 1) Tetap melaksanakan pemenuhan perjanjian; 2) Tetap melaksanakan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; 3) Membayar ganti rugi saja; 4) Pembatalan perjanjian; atau 5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam perjanjian paket wisata di CV. Malinda Tour telah diatur pada pasal 10 apabila terjadi pembatalan oleh pihak klien, yaitu :

1. Apabila dilakukan pembatalan 30 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembataian sebesar 20% dari nilai kontrak

---

<sup>9</sup> J. Satrio, 1993, *op.cit.*, hal. 122.

<sup>10</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit.*, hal. 26.

<sup>11</sup> Subekti, *op.cit.*, hal. 53.

2. Apabila pembatalan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% dari nilai kontrak.
3. Apabila pembatalan dilakukan 7 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembatalan sebesar 75% dari nilai kontrak.
4. Apabila pembatalan dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembatalan sebesar 90% dari nilai kontrak.

Namun dalam prakteknya biasanya ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak dilaksanakan. Biro Perjalanan akan memberikan kebijaksanaan untuk menjaga hubungan baik antara Biro Perjalanan dengan *klien*, hal ini berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam mengadakan hubungan hukum di bidang kepariwisataan.

Dalam penyelesaian perubahan perjanjian paket wisata yang dilakukan oleh Sekolah ini pihak CV. Malinda Tour tidak langsung meminta pembatalan sebesar 75% dari total biaya. Apabila terjadi pembatalan dan dialihkan ke biro perjalanan yang lain, CV. Malinda Tour membebani pada biro yang mengambil alih paket tour ini, meskipun memang memberatkan bagi biro perjalanan yang mengambil alih karena mereka harus membayar *cancel Union fee*. Tapi sebenarnya disisi yang lain mereka pun telah diuntungkan karena semua pesanan bus, hotel, catering tidak terputus melainkan dilanjutkan oleh biro perjalanan yang mengambil alih. Inilah yang menjadi dasar bagi CV. Malinda Tour untuk membebani *cancellation fee* yang cukup besar bagi biro perjalanan yang mengambil alih karena separuh dari pekerjaan mereka telah dilaksanakan oleh CV. Malinda Tour.

Dalam perjanjian paket wisata terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian, maka kedua belah pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika perselisihan tidak bisa dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat maka kedua belah pihak harus menyelesaikan di Pengadilan Negeri setempat. Namun hal ini jarang bahkan belum pernah terjadi di CV. Malinda Tour dan hal itu merupakan upaya terakhir dan tidak ditemui titik temu bersama, karena pembatalan sering kali terjadi karena perubahan waktu kegiatan atau dikarenakan ketidakpuasan satu atau dua item pelayanan yang



kurang memuaskan, sehingga semuanya bisa diselesaikan secara musyawarah atau dengan memberikan diskon atas paket wisata.

Perdamaian menurut pasal 1851 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak. dengan menyerahkan. menjanjikan atau menahan suatu barang. mengakhiri suatu perkara yang sedang menggantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka demi mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk meneegah timbulnya suatu perkara dan perdamaian yang dilakukan oleh CV. Malinda Tour dengan Sekolah ini dilakukan dengan akta dibawah tangan yang diberi materai dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak sehingga memberikan kepastian hukum bagi keduanya.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu Kewajiban pokok Biro Perjalanan Wisata CV.Malinda Tour Solo sebagai penerima pekerjaan adalah melakukan seperangkat pelayanan jasa-jasa pengangkutan, akomodasi, makan/ minum dan menikmati obyek/ atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata. Kewajiban Pengguna jasa atau konsumen sebagai pemberi pekerjaan adalah membayar upah. Apabila tidak dapat berjalan dengan baik karena terjadi perubahan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Sekolah, meskipun telah dilakukan penandatanganan kontrak dan pembayaran DP I sebesar 50% dari total nilai kontrak. Namun perubahan perjanjian yang dilakukan pihak sekolah ditanggapi pembatalan oleh CV Malinda Tour, melainkan diselesaikan secara musyawarah.

Bentuk perjanjian paket wisata yang dibuat oleh CV. Malinda Tour dibuat dalam bentuk tertulis yaitu Biro Perjalanan Wisata telah menyiapkan suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak kemudian pihak klien tinggal mengisi dan

menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian paket wisata yang dibuat ini tidak bersifat *standard contract* murni.

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perubahan perjanjian paket wisata di CV. Malinda Tour selalu diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika jalan musyawarah tidak berhasil maka penyelesaiannya dilakukan secara hukum di Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah: 1) Perjanjian yang dibuat secara tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, seharusnya dapat dilaksanakan secara konsisten. dalam hal ini pembebanan cancellation fee tidak dibebankan pada klien melainkan pada biro perjalanan yang mengambil alih karena hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian. 2) Hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas telah diatur dalam perjanjian yang telah disepakati, ternyata dalam kenyataannya tidaklah selalu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hal ini dapat dikarenakan dari kebijakan biro perjalanan wisata itu sendiri, situasi dan kondisi klien. Seharusnya dengan adanya perjanjian tertulis pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan baik agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. 3) Bila terjadi pembatalan perjanjian paket wisata, maka penyelesaiannya hendaklah diutamakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat karena tidak memakan waktu yang cukup lama, biaya yang dikeluarkan juga sedikit, juga hubungan baik antara klien dan biro perjalanan tetap terjalin. 4) Format perjanjian paket wisata pada Biro Perjalanan Wisata CV. Malinda Tour Solo sebaiknya disempurnakan agar tidak berupa pernyataan penawaran (*aanbod*), melainkan berupa rincian hak dan kewajiban para pihak. agar lebih jelas dan mudah dipahami lawan pihak (pengguna jasa).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Medan.
- Ida Bagus Wyasa Putra, et.al., 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung.

- J. Satrio 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan tanggung Menanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.A. Desky, 2001. *Pengantar Bisnis Biro Perjalanan Wisata*. AdiCitia Karya Nusa Yogyakarta.
- Mukti Fajar Nurdewata, et.al, 2010, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Subekti. 1983. *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta.